



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 6 /VI.02/HK/2020**

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang bersangkutan;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, kolom 5 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan kolom 6 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA – SKPD;
 2. menyusun DPA – SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

12. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
 13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran :
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) LS dan TU;
 6. melakukan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan.
 8. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bendahara Pengeluaran :
1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
 2. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 3. mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 4. mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 5. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 6. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran terhadap bendahara pengeluaran pembantu;
 7. mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan Keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

8. dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan ; dan
9. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.

d. Bendahara Penerimaan :

1. melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
2. menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
3. mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
4. mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pengguna anggaran melalui PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
5. setoran yang diterima harus disetorkan kembali melalui rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
6. harus menyetorkan seluruh penerimaan kas ke rekening kas umum daerah, maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas;
7. dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan;
8. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD; dan
9. tidak boleh menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.

KETIGA : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani Gubernur Lampung kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ P /VI.02/HK/2020
 TANGGAL : 2-1- 2020

**DAFTAR NAMA PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A. NIP. 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Madya/IVd Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	DIANAWATI, S.H., M.M. NIP. 19621212 198812 2 001 Pembina Tk. I/IVb Plt. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung (Belanja Tidak Langsung)	AGENG PIASTOTO, S.H., M.M. NIP. 19720709 199203 1 002 Penata Tk. I/IIId	---
2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung	Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A. NIP. 19641021 199003 1 008 Pembina Utama Madya/IVd Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	DIANAWATI, S.H., M.M. NIP. 19621212 198812 2 001 Pembina Tk. I/IVb Plt. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung (Belanja Tidak Langsung)	AGENG PIASTOTO, S.H., M.M. NIP. 19720709 199203 1 002 Penata Tk. I/IIId	---
3	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Hj. TINA MALINDA, S.Sos., M.M. NIP. 19650725 198610 2 005 Pembina Tingkat I/IVb Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	---	DWI ARYANI NIP. 19760818 200701 2 023 Pengatur/IIc	---
4	Inspektorat Provinsi Lampung	ADI ERLANSYAH, S.E., M.M NIP. 19640214 198903 1 006 Pembina Tingkat I/IVb Inspektur Provinsi Lampung	---	DEWI ROSALINA, S.IP., M.H. NIP. 19880317 200701 2 002 Penata Tk. I/IIId	---

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Drs. SULPAKAR, M.M. NIP. 19690205 198910 1 002 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	---	MARWIN NIP. 19710407 201001 1 001 Pengatur/IIC	LIES KUSUMARINI, S.Sos. NIP. 19640509 198901 2 002 Penata Tk.I/IIId
6	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dr. dr. Hj. REIHANA, M.Kes. NIP. 19630825 198910 2 002 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	---	PUJI HERNOWO, A.Md. NIP. 19730830 199403 1 009 Penata/IIIC	HERMIN PUJI ASTUTI, SE, MM. NIP. 19691130 199103 2 003 Penata Tk.I/IIId
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	ACHMAD SAEFULLOH, S.H. NIP. 19691209 201501 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	---	ZULFALINA NIP. 19800218 200312 2 005 Pengatur Tingkat I/IIId	---
8	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	JAYADI NIP. 19600627 201604 1 001 Pembina Tk. I/IVb Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	---	AGUS SETIAWAN NIP. 19770808 200701 1 027 Pengatur Tingkat I/IIId	---
9	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Drs. SUMARJU SAENI, M.Sc. NIP. 19600110 198803 1 010 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	---	HERU SUWITO, S.E., M.S.Ak. NIP. 19790709 200903 1 003 Penata/IIIC	---
10	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Ir. LUKMANSYAH, M.M. NIP. 19601109 198503 1 004 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	---	DINAR BHAKTI WAHYUDI, S.T. NIP.19880928 201503 1 001 Penata Muda Tk.I/IIIB	DODI LITHEL NONI, S.E. NIP. 19750520 201001 1 006 Penata Muda/IIIA

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	THERESIA SORMIN, S.H. NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	---	HARYANI, S.H. NIP. 19751106 200212 2 006 Penata Tk. I/IIIId	---
12	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	BUDHI DARMAWAN, S.T., M.T. NIP. 19720827 199902 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	---	HERWANTORI, S.E. NIP. 19770820 199703 1 002 Penata/IIIc	---
13	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Drs. INTIZAM NIP. 19660226 198610 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung	---	AKHLAN RUSTAM, S.P. NIP. 19760903 200801 1 011 Penata Muda/IIIa	AMELLINA ALLYA FIRDHA, S.ST. NIP. 19861111 201101 2 007 Penata Muda Tk.I/IIIb
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung	SIFA AINI, S.Sos., M.M. NIP. 19660321 198602 2 001 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung	---	NURJASA NIP. 19760315 200701 1 018 Pengatur/IIc	---
15	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	BAMBANG SUMBOGO, S.E., M.M. NIP. 19710422 199503 1 002 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	---	DYAH SUSANTI, S.E. NIP.19711006 199303 2 006 Penata/IIIc	YATIRAN NIP.19621213 198503 1 007 Penata Muda Tk.I/IIIb

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Ir. A. CHRISNA PUTRA NR, M.EP. NIP. 19610821 198903 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	---	GUSHANI NIP. 19630810 198703 2 008 Penata Muda Tk.I/IIIb	---
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Dr. AGUS NOMPITU, S.E., MTP. NIP. 19670831 199303 1 006 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	---	TRI MARDIANINGSIH, S.E. NIP. 19810310 201101 2 006 Penata Muda/IIIa	SAPIAH, S.Sos. NIP. 19641109 198603 2 010 Penata Tk.I/IIIId
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Drs. QUDROTUL IKHWAN, M.M. NIP. 19650107 199402 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	---	DEFTUMAN NIP. 19631213 198912 1 001 Penata Muda Tk.I/IIIb	---
19	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	HANNIBAL, S.H., M.H. NIP. 19610831 198712 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	---	VANIA CARISSA WANTA NIP. 19850527 200903 2 006 Pengatur/IIc	RUSLI, S.E. NIP. 19670618 199103 1 004 Penata Tk.I/IIIId
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	Ir. FERYNIA NIP. 19610208 198503 2 003 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung	---	PUTRI NURKOMALA S, S.Sos., M.H. NIP.19870830 201001 2 010 Penata/IIIc	TETTY VIOLENTA LUBIS NIP.19680521 199203 2 003 Penata Tk.I/IIIId

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
21	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T, M.T. NIP. 19730222 200312 1 010 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	---	HENIYATI, S.E., M.M. NIP. 19730905 200701 2 005 Penata Muda Tk. I/IIIb	MEINA ROSA MAULIYANTI, S.H. NIP. 19710512 200312 2 005 Penata Tk.I/IIIId
22	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Dr. EDARWAN, S.E., M.Si. NIP. 19620404 198703 1 009 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	---	SURYANI, S.H. NIP. 19681124 199403 2 003 Penata Tk.I/IIIId	---
23	Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	Ir. KUSNARDI, M.Agr, Ec. NIP. 19631123 198803 1 005 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	---	Drs. RIDHAM NIP. 19660612 200003 1 008 Penata Tk.I/IIIId	YUNI PRASETYANINGSIH NIP. 19820629 200903 2 008 Penata Muda/IIIa
24	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Ir. WIYOGO SUPRIYANTO NIP. 19620701 198901 1 001 Pembina Tingkat I/IVb Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	---	DODY DARMAWAN, S.Hut., M.M. NIP. 19790316 200604 1 022 Penata Tk. I/IIIId	KARLIWAN NIP. 19810820 200903 1 002 Pengatur/IIc
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	Ir. PRIHATONO G ZAIN NIP. 19630411 198802 1 002 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	---	YUNENDAR FREDY PUTRA, S.E. NIP.19750625 200903 1 002 Penata Muda Tk. I/IIIb	---

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	SATRIA ALAM, S.E., M.Si. NIP. 19610307 198603 1 007 Pembina Utama Madya/IVd Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	---	ELMA KAISI, S.E. NIP. 19771215 200604 2 011 Penata Tk.I/IIIId	MULYANTO, S.E. NIP. 19630310 198302 1 001 Penata Tk.I/IIIId
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Ir. LILI MAWARTI, M.Si. NIP. 19670426 199203 2 003 Pembina Tingkat I/IVb Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	---	WAJIHUDIN, S.Sos. 19670610 198903 1 007 Penata Tk.I/IIIId	NURUL TRI HADIATI, S.A.B. NIP. 19860407 201402 2 001 Penata Muda Tk. I/IIIb
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Ir. FREDY SM, M.M. NIP. 19650202 199010 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	---	MUJIYONO NIP.19661228 199003 1 006 Penata Muda/IIIa	---
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Drs. MINHAIRIN, M.M. NIP. 19620603 198511 1 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	---	VERAWATI KASIM, S.E., M.M. NIP. 19780512 199803 2 001 Penata Tk. I/IIIId	TRIANA DAMAYANTI, S.P., M.M. NIP. 19781027 200804 2 002 Penata Tk. I/IIIId
30	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Ir. H.E. PITERDONO HZ, S.E., M.M. NIP. 19601122 198903 1 003 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	---	DEWI PAMUNGKAS RATNA SARI, S.H. NIP.19770727 200501 2 012 Penata Tk. I/IIIId	NOVI ASTUTI, S.E. NIP. 19771114 201101 2 003 Penata/IIIc
31	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Drs. LUKMAN, M.M. NIP. 19680906 198901 1 001 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	---	TRIE SANDRA KESUMA, S.E., M.M. NIP. 19790815 200903 2 005 Penata Muda Tk.I/IIIb	---

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	Hi. KHERLANI, S.E., M.M. NIP. 19620504 198103 1 004 Pembina Utama/IVe Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	---	SUPRAPTI, S.Sos., M.M. NIP. 19690318 199402 2 001 Penata Tk.I/IIId	M. NURDIAN SANDRI NIP. 19840625 201001 1 006 Pengatur/IIc
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si. NIP. 19640209 198903 1 008 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	---	CIK MARIA, S.E. NIP. 19691026 199203 2 002 Penata Tk. I/IIId	---
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Drs. SENA ADHI WITARTA, M.H. NIP. 19680728 199402 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	---	ASIYAH NUR ASA, S.Kom. NIP. 19810504 201101 2 009 Penata/IIId	---
35	Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta	YUDA SUKMARINA, S.Sos., M.M. NIP. 19660902 198602 2 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta	---	KOMSARI, S,Kom. NIP. 19760715 200701 1 007 Penata Muda Tk.I/IIId	ANSORI, S.E. NIP. 19770415 200701 1 013 Penata Muda/IIId
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	FITTER SYAHBOEDIN, S.E., M.M. NIP. 19600810 199002 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	---	RIKI IRAWAN, S.H. NIP. 19771031 201101 1 002 Penata/IIId	---

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	B E N D A H A R A	
				PENGELUARAN	PENERIMAAN
1	2	3	4	5	6
37	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	dr. HERY DJOKO SUBANDRIYO, MKM NIP. 19610426 199603 1 001 Pembina Utama Madya/IVd Direktur Utama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek	---	HERIYANTO, S.Kom NIP. 19630315 198402 1 002 Penata Tk.I/IIId	SILFA GUSMAN, S.E. NIP. 19820825 201001 1 017 Penata/IIIC
38	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	dr. ANSYORI NIP. 19631108 200212 1 004 Pembina Tingkat I/IVb Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	---	SULISIA, S.Sos. NIP. 19670909 199103 2 005 Penata/IIIC	NANI ASTUTI, S.E. NIP. 19680707 198903 2 008 Penata Muda Tk.I/IIIB
39	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	THOMAS EDWIN ALI H, ST, SE, MM NIP. 19700704 199703 1 003 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung	---	IBNU PINDO, S.E. NIP. 19730201 200604 1 004 Penata Tk.I/IIId	---

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI